

RECRUITMENT OF LEGISLATIVE CANDIDATES WITH ENTREPRENEURIAL BACKGROUNDS BY POLITICAL PARTIES IN PEKANBARU CITY IN THE 2024 ELECTION

Rekrutmen Calon Legislatif Berlatar Pengusaha oleh Partai Politik di Kota Pekanbaru pada Pemilihan 2024

Rika Yolanda¹, Ali Yusri², Muchid³

^{1,2,3} Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia.

rika.yolanda7894@grad.unri.ac.id

aliyusri@lecturer.unri.ac.id

muchid@lecturer.unri.ac.id

^amirfadbasalamah@gmail.com

(*) Corresponding Author

rika.yolanda7894@grad.unri.ac.id

How to Cite: Rika Yolanda. (2024). Rekrutmen Calon Legislatif Berlatar Pengusaha oleh Partai Politik di Kota Pekanbaru pada Pemilihan 2024. doi: [10.36526/js.v3i2.4800](https://doi.org/10.36526/js.v3i2.4800)

Received : 12-10-2024
Revised : 11-11-2024
Accepted : 30-11-2024

Abstract

Keywords:

Political Parties,
Political Recruitment,
Legislatif Candidates
with Business
Backgrounds

Political Parties have one important function, namely recruiting competent cadres to determine the continuity of the political system. In 2024 Indonesia will face general elections. In the run-up to the general election in Indonesia, Various phenomena occurred, one of which was the phenomenon of the increasing number of entrepreneurs getting involved or running as legislative candidates. There are arguments that say that businessmen's involvement in politics has a negative impact. This does not only happen in the center of Indonesia's capital city, but also occurs in other regions of Indonesia, one of which is Pekanbaru City. This research purpose is to identify the implementation of political party recruitment Golkar, Perindo, Nasdem and PKS Pekanbaru City for entrepreneurs who are legislative candidates for Pekanbaru City 2024. The theory used is the implementation of candidate recruitment by political parties according to Pippa Norris (Haris et al., 2016) consists of the certification stage, nomination stage and election stage. This research uses a descriptive qualitative approach. Data collection techniques used were interviews and documentation. Research location in Pekanbaru City. The results of this research show that the recruitment process carried out by the political parties Golkar, Perindo, Nasdem and PKS was carried out openly, following the systematics that apply to each party. Registration for each party reached more than 100% of the number required for the party to be registered with the Pekanbaru City General Election Commission. Internal factors owned by entrepreneurs, religious norms and self-values of entrepreneurs, financial resources and motivation of legislative candidates with entrepreneurial backgrounds are internal factors for political parties recruiting entrepreneurs. Meanwhile, external factors include mass support from legislative candidates with entrepreneurial backgrounds and conditions of political change.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang menganut demokrasi. Demokrasi berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) untuk memilih pemimpin yang mengisi jabatan – jabatan tertentu dalam politik. Pemilihan umum (Pemilu) dilaksanakan yang bertujuan sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk membentuk pemerintahan perwakilan. Hal ini berarti pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat. Berdasarkan hasil kutipan dari (Pamungkas, 2009) Indonesia melaksanakan Pemilihan Umum pertama kali pada tahun 1955 di era Orde Lama yang dilaksanakan dua kali dalam tahun tersebut yaitu pada 29 September 1955 untuk memilih Anggota DPR dengan jumlah 118 peserta dan 25 Desember 1955 untuk memilih anggota dewan konstituante dengan jumlah 91 peserta. Selanjutnya, pada masa Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto selama 32 Tahun menjabat sebagai presiden Indonesia telah melaksanakan enam kali penyelenggaraan Pemilihan Umum di tahun 1971,1977,1982,1987,1992 dan 1997 untuk memilih anggota DPR, anggota DPR tingkat I dan Tingkat II, pada era ini Presiden di pilih oleh MPR.

Era Reformasi di Indonesia dimulai pada tahun 1998 hingga saat ini, pada era reformasi telah melaksanakan Pemilihan Umum sebanyak lima kali. Pertama kali dilaksanakan pada tahun 7 Juni 1999 untuk memilih anggota DPR, DPD dan DPRD, sedangkan Presiden masih dipilih oleh MPR. Pada Pemilu kedua di era reformasi yaitu tahun 2004 mengalami 2 kali pemilu dalam tahun tersebut 5 April 2004 untuk pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, kemudian di 5 Juli 2004 dan 20 September dua kali putaran untuk pemilihan Presiden. Pemilu yang ketiga pada tahun 9 April 2009 untuk memilih anggota DPR, DPD dan DPRD, pada 8 Juli 2009 untuk pemilihan Presiden. Selanjutnya, pada Pemilu ke empat pada 9 April 2014 untuk pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, pada 9 Juli 2014 untuk Pemilihan Presiden. Pemilu yang Kelima pada 17 April 2019 dilakukan secara serentak untuk pemilihan Presiden, Anggota DPR, DPD dan DPRD. (kpu.go.id, 2015)

Fenomena peralihan profesi ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Fenomena peralihan profesi pengusaha menjadi politikus sering dikenal dengan istilah peralihan profesi dari pengusaha menjadi penguasa. Fenomena ini akan memberikan dampak negatif terhadap pembangunan bangsa di Indonesia. Karena, fenomena ini akan menyebabkan rendahnya kadar kemandirian politik dan memberikan peluang besar untuk terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme, serta akan berdampak besar terbangunnya sistem oligarki ekonomi dan politik yang mapan (Yani, 2005). Dari sisi pengusaha, mereka akan berupaya untuk memperoleh akses terhadap sumber daya ekonomi, monopoli dan lisensi bisnis, kemudian dari sisi penguasanya atau pejabat public, mereka memiliki wewenang terhadap kebijakan public, lisensi dan kontrak proyek. Sehingga jika dua hal tersebut terjadi split personality, akan berdampak bahaya karena kebijakan dan sumber daya dijalani atau dikuasai oleh kelompok bisnis, dan akan terjadi penyalahgunaan kekuasaan. (Djani, 2005)

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada masa 2019 – 2024 memiliki jumlah anggota sebanyak 575 orang, berdasarkan penelitian Marepus Corner terdapat 55% dari jumlah tersebut atau setara dengan 318 orang yang

memiliki latar belakang pebisnis atau pengusaha. Dalam hal ini pengusaha yang terjun ke dalam dunia politik terbagi menjadi dua yaitu anggota DPR yang terlibat langsung, merupakan actor utama yang mengisi jabatan strategis pada suatu perusahaan, sedangkan type yang kedua yaitu anggota DPR yang tidak terlibat langsung yang berarti anggota DPR yang keluarga intinya memiliki perusahaan atau korporasi (Putri, 2023). Peralihan profesi pengusaha menjadi politisi memberikan keuntungan kedua belah pihak antara pengusaha dan partai politiknya. Karakter negoisasi yang dimiliki pengusaha, merupakan karakter yang dibutuhkan dalam dunia politik. Tetapi, pengusaha yang terlibat dalam politik sering mempergunakan kekuasaannya untuk memperluas akses dan pasar bisnisnya atau apapun itu untuk kepentingan bisnisnya, sehingga kepentingan masyarakat tidak menjadi yang utama (republica.co.id, 2015).

Fenomena pengusaha menjadi penguasa atau keterlibatan pengusaha dalam politik sudah lama terjadi, sejak masa orde lama hingga saat ini fenomena ini terus berlanjut. Bahkan fenomena ini tidak hanya terjadi di pusat pemerintahan Indonesia, tetapi fenomena ini juga terjadi hingga di daerah – daerah yang ada di Indonesia. Salah satu daerah Indonesia yang terlihat mengalami keterlibatan pengusaha dalam politik yaitu Pekanbaru yang ada di Provinsi Riau. Penulis mengumpulkan informasi jumlah nama – nama pengusaha yang mengikuti Pemilihan Umum di 2024 mendatang untuk menjadi anggota legislatif tingkat kota Pekanbaru berdasarkan dari website infopemilu.kpu.go id, media online dan media sosial pribadi calon legislatif tersebut. Total keseluruhan calon anggota legislatif yang mengikuti pemilihan legislatif 2024 Kota Pekanbaru berjumlah 758 orang, yang terbagi dari Daerah Pilihan 1 hingga Daerah Pilihan 7. Berikut jumlah seluruh calon legislatif Kota Pekanbaru dan jumlah nama pengusaha yang menjadi Calon Legislatif pada Pemilihan Umum 2024 di Pekanbaru.

Tabel 1 Jumlah Calon Legislatif Kota Pekanbaru pada Pemilihan Umum 2024

Partai Politik	Jumlah							Total
	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	
PKB	6	7	8	6	7	10	6	50
Gerindra	6	7	7	6	7	9	6	48
PDIP	6	7	8	6	7	10	6	50
Golkar	6	7	8	6	7	10	6	50
Nasdem	6	7	8	6	7	10	6	50
Buruh	2	4	0	1	0	5	3	15
Gelora	6	7	8	6	7	10	6	50
PKS	6	7	8	6	7	10	6	50
PKN	4	5	8	4	3	1	2	27
HANURA	6	7	8	6	7	7	6	47
PAN	6	7	8	6	7	10	6	50
PBB	5	2	5	5	3	8	3	31
Demokrat	6	7	8	6	7	10	6	50
PSI	6	7	8	0	5	9	6	41
Perindo	6	7	8	6	7	10	6	50
PPP	6	7	8	5	7	10	6	49

Ummat	6	7	8	6	7	10	6	50
Total	95	109	124	87	102	149	92	758

Sumber: website [infopemilu.kpu.go id](http://infopemilu.kpu.go.id)

Tabel 2 Jumlah Pengusaha yang menjadi Calon Legislatif Kota Pekanbaru pada Pemilihan Umum 2024

Partai Politik	Jumlah							Total
	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	
PKB	1	3	3	1	1	1	2	12
Gerindra	2	2	1	3	2	3	2	15
PDIP	0	2	2	0	0	2	2	8
Golkar	4	3	7	3	4	5	5	31
Nasdem	2	4	3	4	2	3	2	20
Buruh	1	0	0	0	0	0	0	1
Gelora	1	1	4	2	1	2	1	12
PKS	1	3	3	3	3	2	4	19
PKN	1	0	1	0	0	0	0	2
Hanura	1	4	1	2	0	1	0	9
PAN	2	4	3	1	1	3	0	14
PBB	1	0	1	0	0	2	0	4
Demokrat	2	2	5	1	3	3	1	17
PSI	2	1	1	0	1	1	1	7
Perindo	2	4	2	3	5	4	4	24
PPP	3	1	3	0	1	0	2	10
Ummat	0	4	2	2	1	2	1	12
Total	26	38	42	25	25	34	27	217

Sumber: website [infopemilu.kpu.go id](http://infopemilu.kpu.go.id) dan media online

Dilihat dari tabel 2 di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat jumlah pengusaha atau pebisnis yang menjadi calon legislatif yang diusung oleh Partai pada pemilihan umum tahun 2024 di Pekanbaru 217 orang dari 758 orang yang di daftarkan oleh masing – masing Partai. jumlah tersebut akan bersaing untuk memperoleh suara dari masyarakat agar dapat memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru. Jika ditelaah kembali masih terdapat banyak nama pengusaha yang terlibat mencalonkan diri sebagai anggota kegislatif atau bahkan sudah menjadi anggota legislatif, baik itu di tingkat Kota Pekanbaru, di tingkat Provinsi Riau, bahkan tingkat pusat. Tahun 2024 anggota legislatif Kota Pekanbaru yang terpilih sebanyak 50 orang, terdapat 20 orang yang berlatar pengusaha, angka yang cukup besar untuk pengusaha yang berhasil memperoleh kemenangan.

Fenomena partai politik merekrut pengusaha untuk masuk ke dunia politik bukanlah suatu hal yang dilarang. Karena, Indonesia merupakan negara yang menjunjung demokrasi, dimana setiap warganya memiliki hak untuk dipilih dan

memilih. Hanya saja, bisnis dan politik tidak bisa dipegang oleh satu orang, hal ini bermaksud untuk menghindari konflik kepentingan yang akan diutamakan seseorang politisi yang juga terlibat dalam dunia bisnis. Sehingga, akan berdampak kurang optimalnya pelaksanaan kinerja dalam dunia politik untuk mengutamakan kepentingan masyarakat yang menghasilkan kesejahteraan pada masyarakat. Maka, hal tersebut akan menjadi pro dan kontra dikalangan public.

Pembahasan tentang pengusaha menjadi calon anggota legislative sudah pernah dikaji oleh (Tongari et al., 2021), (Fauziah, 2017). Berdasarkan dari penelitian yang telah mereka lakukan berfokus terhadap satu partai saja, dan focus terhadap kecurangan yang dilakukan oleh pengusaha dalam pemilihan legislative. Sementara yang dilakukan oleh penulis menjelaskan perbandingan pelaksanaan rekrutmen partai politik Golkar, Perindo, Nasdem dan PKS Kota Pekanbaru Tahun 2024. Penulis menggunakan teori yang dikemukakan oleh Pippa Norris yang dikutip dari (Katz & Crotty, 2006) mengenai pelaksanaan rekrutmen kandidat oleh partai politik. Teori tersebut memaparkan tiga tahapan yaitu tahapan sertifikasi, tahap nominasi dan tahap pemilu.

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode penelitian dengan metode pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami kondisi dan mendeskripsikan kondisi secara rinci. Jenis penelitian deskriptif melalui studi pustaka yang memanfaatkan jurnal-jurnal dan media online serta pengumpulan data langsung dari informan yang sesuai dengan pembahasan rekrutmen calon legislatif berlatar pengusaha oleh partai politik di Kota Pekanbaru pada Pemilihan Umum Tahun 2024. Lokasi penelitian di Kantor DPD Partai Golkar, Perindo, Nasdem dan PKS Kota Pekanbaru. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya, dalam penulisan ini menggunakan jenis-jenis data yaitu Primer dan Sekunder. Data primer adalah jenis data yang diperoleh langsung dari pihak informan dengan menggunakan wawancara di lapangan, sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung di lapangan melainkan didapatkan dari hasil orang lain. (Nasution, 2023)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rekrutmen calon legislative berlatar pengusaha oleh partai politik Golkar, Perindo, Nasdem dan PKS Kota Pekanbaru

Tahun 2024 merupakan pesta demokrasi di Indonesia. Hal ini dikarenakan pada tahun 2024 Indonesia melakukan Pemilihan Umum untuk mengisi posisi Presiden dan Wakil Presiden, Legislatif, serta Kepala Daerah. Kota Pekanbaru merupakan salah satu daerah di Indonesia yang melakukan pemilihan umum. Posisi legislatif sangat banyak diminati oleh orang – orang, hal ini dibuktikan dengan banyaknya pendaftar calon legislatif yang bersaing untuk memperoleh perhatian dan suara dari masyarakat. Fenomena yang menarik pada pemilihan legislatif 2024 di Kota Pekanbaru yaitu banyaknya peminat orang – orang dari berbagai profesi untuk menjadi calon legislatif terutama keterlibatan pengusaha untuk menjadi calon legislatif di Kota Pekanbaru pada tahun 2024 ini. Keterlibatan pengusaha dalam dunia politik di Indonesia sudah terjadi sejak lama,

dan tidak ada regulasi yang mengatur larangan keterlibatan pengusaha dalam dunia politik, hanya saja dengan hadirnya para pengusaha dalam dunia politik menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Keterlibatan pengusaha tersebut bahkan saat ini sudah terjadi di berbagai daerah Indonesia, salah satunya Kota Pekanbaru Provinsi Riau.

Pada tanggal 14 Februari 2024 masyarakat di Indonesia melakukan pemilihan terhadap 5 kertas suara yaitu:

- Presiden dan Wakil Presiden (warna abu – abu)
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (warna kuning)
- Dewan Perwakilan Daerah (warna merah)
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (warna biru)
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (warna hijau)

Kota Pekanbaru 2024 terjadi perubahan penambahan kuota anggota legislatif yang terpilih, hal ini diperkuat dengan hasil wawancara berikut dengan bapak Salmon selaku perwakilan dari Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru:

“terjadi perubahan antara 2019 dan 2024. Dimana 2019 kuota anggota legislatif kota Pekanbaru hanya berjumlah 45 orang, kemudian di tahun 2024 terjadi perubahan menjadi 50 orang, hal ini terjadi dikarenakan bertambahnya jumlah penduduk kota Pekanbaru yang mencapai angka 1.074.000 lebih”

Pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin meningkat di Kota Pekanbaru mengakibatkan bertambahnya jumlah kuota anggota legislatif kota Pekanbaru di tahun 2024. Pada tahun 2019 kuota berjumlah 45 orang, kemudian meningkat menjadi 50 orang pada tahun 2024. Tidak hanya terjadi perubahan pada jumlah kuota anggota legislatif kota Pekanbaru, perubahan terjadi pada daerah pilihan yang ada di kota Pekanbaru, berikut penjelasan dari bapak Salmon mengenai perubahan daerah pilihan:

“terdapat daerah pilihan yang akan dipecahkan untuk pemilu 2024 ini. Yang pada mulanya hanya terdapat 6 daerah pilihan, saat ini menjadi 7 daerah pilihan yaitu dapil 1 : Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru Kota, Lima Puluh (6 kursi), dapil 2: Kecamatan Rumbai Barat, Rumbai, Rumbai Timur (7 kursi), dapil 3 : Kecamatan Tenayan Raya, Kulim (8 kursi), dapil 4 : Kecamatan Sail, Bukit Raya (6 kursi), Dapil 5 : Kecamatan Marpoyan Damai (7 kursi), Dapil 6: Kecamatan BInawidya, Tuah Madani (10 kursi), Dapil 7 : Kecamatan Senapelan, Payung Sekaki (6 kursi)”

Perubahan daerah pilihan yang telah dijelaskan di atas juga salah satu dampak pertambahan penduduk kota Pekanbaru, sehingga perubahan tersebut sudah disetujui oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

1. Partai Golkar

Partai Golongan Karya merupakan partai yang memiliki calon legislatif yang berlatar pengusaha paling banyak di pemilihan legislatif kota Pekanbaru tahun 2024 ini. Pastinya hal ini memiliki berbagai pertimbangan dan alasan tersendiri dari pihak Golkar untuk menetapkan nama – nama yang akan bersaing di pemilihan legislatif kota Pekanbaru 2024.

A. Tahap Sertifikasi

Tahap pertama yang dilalui sebelum melakukan penetapan nama – nama calon yang akan di daftarkan ke Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru untuk bersaing memperoleh suara dari masyarakat. Pada tahap ini Golkar dalam proses rekrutmen calon legislatif memiliki alur yang tersusun secara sistematis untuk menghadapi proses pemilihan umum tahun 2024. Bapak Roni Amriel selaku Sekretaris DPD Partai Golkar Kota Pekanbaru mengatakan bahwa:

“Rekrutmen Partai Golkar untuk menjadi calon legislatif Kota Pekanbaru pada pemilihan legislatif 2024 dilakukan secara terbuka, yang artinya siapa saja bisa daftar atau masuk ke dalam partai Golkar untuk mencalonkan diri sebagai calon legislatif. Golkar bukanlah partai yang eksklusif, meskipun merupakan partai yang tua, Golkar sangat terbuka kepada siapa saja yang ingin bergabung di Golkar. Terdapat google form yang disediakan untuk mendaftarkan diri sebagai calon legislatif 2024. Rekrutmen yang dilakukan secara sistematis dan telah dilaksanakan rekrutmen lebih awal dari partai – partai lainnya. Alasan dilakukannya rekrutmen lebih awal agar calon – calon legislatif tersebut mengenalkan diri atau mendekati diri kepada masyarakat, kemudian mensosialisasikan mengenai partai Golkar serta mengantisipasi hasil survey yang akan dilakukan nantinya. Sebelum pemilihan legislatif, Golkar telah memberikan sk fungsionalis kepada pendaftar rekrutmen.”

Partai Golkar melakukan pergerakan lebih awal dari partai – partai lainnya. Salah satu strategi yang dilakukan oleh partai Golkar untuk menarik perhatian dan suara yang di peroleh dari masyarakat dengan melakukan pendekatan lebih awal kepada masyarakat. Kemudian, untuk menjadi calon – calon legislatif partai Golkar tidak memiliki batasan kepada masyarakat yang ingin bergabung. Rekrutmen yang dilakukan secara terbuka, serta sudah terdapat sk fungsionalis. Tetapi, dalam pelaksanaan rekrutmen calon legislatif di tahun 2024 ini, partai Golkar melakukan perubahan. Hal ini diungkapkan oleh bapak Roni Amriel :

*“untuk menghadapi pemilihan legislatif 2024 kota Pekanbaru, partai Golkar melakukan perubahan pada system rekrutmennya. Yang pada mulanya untuk mendaftarkan diri sebagai calon legislatif di partai Golkar harus melalui Pimpinan Kecamatan (PK) yang terdiri dari 15 Kecamatan, namun saat ini dilakukan perubahan dengan rekrutmen legislatif tidak melalui Pimpinan Kecamatan (PK) lagi, pendaftaran diri langsung ke DPD Kota Pekanbaru secara manual dan otomatis. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya berbagai kecurangan yang dilakukan, serta menghindari terjadinya *conflic of interest* antara calon dan pihak pimpinan kecamatan.”*

Pendaftaran calon legislatif yang pada mulanya melalui Pimpinan Kecamatan, tetapi dilakukan perubahan dengan tidak melalui Pimpinan Kecamatan lagi, agar tidak terjadi *conflic of interest*. Pendaftaran dapat dilakukan secara manual dan otomatis melalui google form yang telah disediakan oleh Partai Golkar Kota Pekanbaru. Panduan atau pedoman

dalam proses rekrutmen yang dilakukan oleh partai Golkar sebagai berikut yang diungkap oleh pak Roni Amriel

“mengenai proses rekrutmen yang dilakukan oleh kami partai golkar, berpedoman pada peraturan organisasi partai golongan karya tentang penugasan fungsionaris partai golongan karya”

Peraturan Organisasi Partai Golkar atau dikenal dengan istilah PO5 merupakan pedoman para kader atau calon legislatif partai Golkar untuk melaksanakan mekanisme rekrutmen calon legislatif. Yang artinya selain dari peraturan atau pedoman yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru, Golkar Pekanbaru memiliki pedoman tersendiri juga untuk menghadapi proses pemilihan umum.

B. Tahap Nominasi

Tahap nominasi merupakan tahap yang dilakukan setelah tahap sertifikasi. Tahap yang akan menentukan jumlah orang yang akan di daftarkan ke komisi pemilihan umum untuk bersaing dalam proses pemilihan legislatif kota Pekanbaru. Tahun 2024 ini setiap partai memiliki kesempatan untuk mencalonkan orang – orang bertanding dalam pemilihan legislatif 2024 sebanyak 50 orang yang disebar ke beberapa daerah pilihan. Ariel Amri mengungkapkan bahwa:

“sebanyak 148 orang yang mendaftarkan dirinya menjadi calon legislatif di partai Golkar. 148 orang tersebut tidak hanya dari kader lama partai Golkar, tetapi ada juga dari masyarakat. 148 orang tersebut disaring lagi melalui beberapa tahapan dan dilihat dari beberapa kategori yang telah ditentukan dari pihak partai Golkar. Terdapat sesi wawancara partai Golkar kepada pendaftar calon legislatif. Pada proses tersebut juga dilakukan survey oleh panitia rekrutmen ke lingkungan tempat tinggal pendaftar. Dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana respon lingkungannya terhadap pencalon yang dilakukan.”

Dari hasil wawancara yang telah dipaparkan oleh bapak Roni Amriel terdapat 98 orang yang tidak lulus verifikasi yang dilakukan oleh partai Golkar. Sehingga terdapat 50 orang yang lulus verifikasi dari pihak partai Golkar untuk bersaing dalam proses pemilihan legislatif 2024. 148 tersebut dilihat dari beberapa kategori yang disebutkan oleh pak Roni Amriel selaku panitia rekrutmen calon legislatif 2024 dari partai Golkar.

“penilaian 148 orang tersebut dilihat dari beberapa poin yaitu popularitas, akseptabilitas (daya terima masyarakat), elektabilitas (ketertarikan masyarakat) yang dimiliki dari calon legislatif tersebut. Istilah kategori penilaian lainnya yaitu takah (performance), tokoh (akseptabilitas) dan tagueh (sehat jasmani). Proses penentuan juga ditentukan oleh beberapa kategori yaitu Pendidikan, pengabdian, struktur di Golkar dan tidak kalah pentingnya yang saat ini yaitu finansial yang dimiliki. Semua hal tersebut dilakukan selama 6 bulan oleh tim penyeleksi, door to door ke rumah calon legislatif yang 148 orang tersebut dilakukan oleh tim penyeleksi ”

Banyaknya peminat yang ingin bergabung menjadi calon legislatif dari partai Golkar terbukti dari jumlah awal pendaftarannya 148 orang. 148 orang tersebut harus dipilih kembali berdasarkan kriteria atau kategori yang telah ditentukan oleh partai Golkar. Banyaknya kategori yang harus dicapai oleh calon legislatif, seperti Pendidikan, pengabdian pada partai, struktur di partai, daya terima masyarakat terhadap calon, kemudian dilihat dari keterpilihan masyarakat terhadap calon legislatif tersebut dan tidak kalah pentingnya finansial yang dimiliki oleh calon legislatif tersebut. Point – point tersebut yang menjadi pertimbangan tim penyeleksi partai golkar untuk menghasilkan calon legislatif berjumlah 50 orang. Proses tersebut dilakukan secara wawancara dan door to door ke rumah serta lingkungan calon legislatif tersebut selama 6 bulan sebelum pendaftaran nama – nama calon legislatif dari partai Golkar ke komisi pemilihan umum. Sebelum didaftarkan nama- nama tersebut ke pihak komisi pemilihan umum, di Golkar sendiri terdapat tahapan sebagai berikut yang diungkap oleh pak Roni Amriel :

“di Golkar yang pada mulanya harus mendaftar ke pihak pimpinan kecamatan, tetapi di tahun ini hal tersebut tidak diterapkan lagi. Saat ini bisa mendaftar secara langsung kepada pihak DPD Partai Golkar. Nama – nama tersebut akan diserahkan kepada pihak DPP Partai Golkar, selanjutnya dikembalikan lagi kepada pihak DPD partai Golkar untuk penetapan nama – nama yang akan didaftarkan”

Perubahan yang dilakukan tidak lagi pendaftaran melalui pimpinan kecamatan partai golkar. Tetapi, pendaftaran dilakukan secara langsung kepada pihak DPD Partai GOLkar, kemudian nama – nama tersebut akan diserahkan kepada pihak DPP, dan jika terjadi kesepakatan akan dikembalikan kembali nama – nama tersebut kepada pihak DPP Partai Golkar.

C. Tahap Pemilu

Tahap terakhir dalam proses pemilihan legislatif yaitu proses pemilihan umum. Sebelum dilakukannya pemilihan umum, pastinya terdapat proses penentuan nomor urut yang dilakukan oleh setiap partai untuk calon – calon legislatifnya. Di partai Golkar sendiri untuk penentuan nomor urutnya sebagai berikut yang dijelaskan oleh pak Roni Amriel :

“dalam penentuan nomor urut di partai Golkar ditentukan oleh pihak partai golkar sendiri. Dengan ketentuan antara nomor urut 123 harus ada diisi oleh perempuan, kemudian 456 juga harus ada diisi oleh perempuan. Dalam penentuan nomor urut bisa dinegosiasi, yang bisa melakukan negosiasi dilihat dari track recordnya kepada masyarakat, partai serta loyalitas yang diberikannya. Saat system proporsional nomor urut tidak berdampak sangat besar untuk kemenangan. Tetapi, nomor urut juga sering menimbulkan konflik antar calon satu dengan lainnya”

Nomor urut yang sangat identik dalam proses pemilihan legislatif, di partai Golkar sendiri ditentukan oleh pihak partai. Dalam penentuan nomor urut di partai Golkar bisa dilakukan negosiasi, jika nomor urut

yang diperoleh tidak sesuai dengan keinginan calon legislatif. Negosiasi dilakukan dengan berbagai pertimbangan seperti sikapnya serta loyalitasnya ke masyarakat, partai, serta dilihat dari sisi keseriusannya untuk menghadapi proses pemilihan legislatif 2024. Di saat system pemilihan legislatif menggunakan system proporsional terbuka, nomor urut tidak memberikan dampak yang sangat besar untuk memperoleh kemenangan. Kecuali, jika dilakukannya system proporsional tertutup, nomor urut akan menjadi sebuah rebutan yang dilakukan oleh setiap calon legislatif untuk memperoleh kemenangannya.

“di Golkar saya tidak berada di nomor urut 1, tetapi sebenarnya saya sudah banyak mendapatkan tawaran dari partai lain untuk bergabung dengan mereka, hingga dijanjikan nomor urut 1, saya tetap menolak, karena menurut saya pada proporsional terbuka saat ini nomor urut bukan menjadi faktor utama kemenangan, di Golkar nomor urut 1 udah diisi oleh struktur di partai Golkar itu sendiri”

Proporsional terbuka yang dialami pada pemilihan umum 2024 ini, membuat beberapa calon legislatif tidak terlalu berambisi untuk mengisi nomor urut 1. Di Golkar sendiri nomor urut awal diisi oleh orang – orang yang berada di struktur partai Golkar. Hasil yang diperoleh oleh partai Golkar dalam pelaksanaan pemilihan umum kota Pekanbaru Tahun 2024 yaitu memperoleh 5 kursi kemenangan.

2. Partai Perindo

Partai Pesatuan Indonesia atau dikenal dengan Partai Perindo. Berdasarkan data yang penulis peroleh, partai Perindo kota Pekanbaru menempati posisi kedua terbanyak calon legislatifnya yang berlatar pengusaha. Terdapat 24 orang dari 50 orang yang didaftarkan oleh partai Perindo ke Komisi Pemilihan Umum untuk bersaing dalam pemilihan legislatif 2024.

A. Tahap Sertifikasi

Tahap awal dalam proses rekrutmen yang dilakukan oleh partai perindo. Sama halnya seperti partai golkar. Partai perindo juga memiliki alur dalam proses rekrutmen calon legislatif yang akan di daftarkan ke Komisi Pemilihan Umum untuk bersaing dalam pemilihan legislatif 2024 tingkat kota Pekanbaru. Berikut system rekrutmen partai perindo yang di ungkap oleh pak Fery selaku sekretaris DPD Partai Perindo Kota Pekanbaru.

“rekrutmen partai Perindo dilakukan secara terbuka. Siapa saja boleh mendaftar, asalkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika ia punya potensi akan diterima. Penerimaan dengan mengisi formulir. Di Partai Perindo tanpa uang mahar atau pangkal untuk bergabung.”

Partai Perindo merupakan salah satu partai termuda di Indonesia. Dalam proses rekrutmen untuk memperoleh nama – nama yang akan di daftarkan ke Komisi Pemilihan Umum, partai Perindo melakukan system secara terbuka, dengan mengisi form yang disediakan secara online. Meskipun merupakan partai yang masih muda, Partai Perindo memiliki keputusan pendaftaran tidak dengan uang mahar atau uang

pangkal untuk calon legislatif bergabung di partai Perindo. Perindo yang berhasil membuat keputusan tanpa adanya uang mahar yang dibebankan kepada pihak pendaftar untuk calon legislatif menjadi salah satu pendorong, banyaknya masyarakat yang ingin bergabung di partai perindo untuk mencalonkan diri sebagai calon legislatif. Proses pengumpulan nama selesai, terdapat tahap berikutnya yang dijelaskan oleh pak Fery selaku sekretaris DPD partai Perindo

“setelah terkumpulnya nama – nama yang mendaftar di DPD Partai Perindo. Nama – nama tersebut akan diserahkan kepada pihak DPP partai Perindo. Posisi DPP Partai Perindo memiliki wewenang dalam proses penetapan nama – nama calon yang akan di daftarkan. Jika sudah ditetapkan oleh DPP partai Perindo, nama – nama tersebut akan diserahkan kembali kepada DPD partai Perindo, yang akan dilanjutkan untuk mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum secara online melalui SILON / Sistem Informasi Calon”

Berbeda dengan partai Golkar, partai Perindo dalam proses penetapan nama – nama calon yang akan di daftarkan merupakan kewenangan dari pihak DPP Partai Perindo. sehingga, sebelum didaftarkan kepada pihak Komisi Pemilihan Umum secara online, nama – nama tersebut wajib diserahkan kepada DPP untuk diseleksi, kemudian akan di berikan kembali kepada pihak DPD Partai Perindo Kota Pekanbaru. Tidak kalah menariknya banyaknya dari kalangan pengusaha yang juga ikut bergabung ke partai Perindo untuk menjadi calon legislatif yang diusung oleh partai Perindo. Pak Fery menjelaskan bahwa orang – orang yang bergabung dapat partai Perindo untuk menjadi calon legislatif yang diusung oleh Partai Perindo terdiri dari berbagai kalangan:

“yang mendaftarkan diri ke Perindo terdiri dari berbagai kalangan, baik beliau memiliki pengalaman politik ataupun tidak. Di tahun saat ini banyaknya orang – orang yang pada awalnya dari partai lain, kemudian pindah ke Perindo untuk mendaftarkan diri menjadi calon legislatif partai Perindo. salah satunya saya, yang pada mulanya berada di partai Hanura kemudian bergabung menjadi partai Perindo. banyaknya pengusaha juga ikut bergabung dalam partai perindo.”

Peminat partai perindo yang dari berbagai kalangan, dan berbagai pengalaman. Ada yang memang belum sama sekali memiliki pengalaman dalam dunia politik, terdapat juga yang sudah memiliki pengalaman politik. Dikarenakan terdapat calon legislatif yang berasal dari partai lain kemudian bergabung ke partai Perindo, dengan berbagai faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Pedoman yang digunakan dalam perindo, berikut penjelasan dari bapak Fery selaku sekretaris dan panitia rekrutem

“di partai Perindo untuk pedomannya, menggunakan yang telah disediakan oleh pihak komisi pemilihan umum, mengikuti syarat dan aturan yang berlaku tersebut. Kemudian, adanya pedoman administrasi organisasi partai Perindo.”

Dalam melaksanakan partai perindo atau rekrutmen terhadap calon legislatif yang bergabung dalam partai perindo, terdapat pedoman atau peraturan yang dijadikan acuan oleh DPD Partai Perindo kota Pekanbaru. Selain pedoman dari komisi pemilihan umum, terdapat juga pedoman administrasi organisasi partai perindo.

B. Tahap Nominasi

Jumlah nama yang di daftarkan oleh pihak partai Perindo 50 orang, yaitu jumlah maksimalnya pendaftaran nama – nama calon anggota legislatif setiap partai, dengan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan. Sama hal partai lainnya, 50 orang yang di tetapkan sebagai calon legislatif dari partai perindo merupakan hasil dari seleksi pendaftar lainnya. Berikut penjelasan pak Fery:

“terdapat 100 orang yang mendaftar, kemudian diseleksi menjadi 50 orang. 50 orang tersebut merupakan hasil rekomendasi pihak DPP kepada pihak DPD Perindo Kota Pekanbaru. 100 orang tersebut tidak hanya dari pihak kader Perindo, karena Perindo menggunakan system terbuka untuk rekrutmennya. Sehingga banyak dari berbagai kalangan yang mendaftar untuk menjadi calon legislatif yang diusung oleh pihak partai Perindo”

Tidak jauh berbeda dengan partai Golkar, Perindo juga melakukan proses seleksi terhadap pendaftar calon legislatifnya. Yang diseleksi berdasarkan kriteria – kriteria yang telah ditentukan oleh pihak partai Perindo. dari 100 orang diseleksi menjadi 50 orang, yang artinya terdapat 50 orang yang tidak lolos seleksi. Meskipun partai Perindo masih dikategori partai yang muda, tetapi dapat dilihat dari pemaparan di atas bahwa untuk peminat orang – orang yang bergabung dalam partai perindo cukup banyak. Artinya partai Perindo termasuk partai yang dipertimbangkan oleh masyarakat untuk bergabung di dalam partai tersebut. Kemudian, di penjelasan sebelumnya disebutkan bahwa pendaftarnya juga ada yang berasal dari partai – partai lainnya. Mengenai ketentuan nomor urut yang diperoleh oleh setiap calon legislatif partai Perindo dijelaskan oleh pak Fery selaku Sekretaris dan panitia rekrutmen partai Perindo sebagai berikut:

“nomor urut di partai Perindo tidak bisa dinegosiasi. Nomor urut tidak berpengaruh pada system proporsional terbuka, sehingga tidak ada gonjang ganjing yang terjadi antara calon legislatif dengan panitia rekrutmen partai Perindo. dalam penentuan nomor urut dapat dilihat dari latar belakang calon legislatif tersebut, jika dia merupakan kader dari partai Perindo akan diutamakan dalam pemberian nomor urut.”

Nomor urut di Partai Perindo tidak bisa dinegosiasi oleh pihak calon legislatif kepada pihak partai. Karena penentuan nomor urut sudah ditetapkan oleh pihak partai Perindo. Sehingga, pihak calon legislatif bersedia menerima keputusan nomor urut yang telah ditetapkan oleh pihak partai. Hal ini terdapat perbedaan antara partai Perindo dan partai Golkar. Partai Golkar dalam pemberian nomor urut bisa dilakukan

negosiasi oleh pihak calon legislatifnya. Tetapi, pernyataan pak Fery mengenai nomor urut yang tidak bisa di negosiasi dibantah oleh pak Khairul selaku calon legislatif partai Perindo sebagai berikut:

“mengenai nomor urut bisa direquest, saya request nomor urut 7 pada daerah pilihan Rumbai. Dikarenakan nomor 7 merupakan angka favorit saya.”

Pernyataan di atas yang dikemukakan bahwa nomor urut dalam partai Perindo Kota Pekanbaru bisa dinegosiasi berdasarkan keinginan calon legislatif yang mendaftar. Hal ini juga diperkuat dengan pendapat pak Budi selaku calon legislatif yang diusung oleh partai Perindo yang mengatakan bahwa:

“kedekatan calon legislatif dengan ketua partai Perindo dapat berdampak pada nomor urut. Dekat dengan ketua, nomor urut bisa direquest sesuai dengan keinginan. Saya request nomor 5 kepada ketua partai Perindo kota Pekanbaru, karena merupakan angka keberuntungan saya”

Dengan dua pernyataan yang di atas yang disampaikan oleh dua orang yang berbeda. Dapat diartikan bahwa dalam penentuan nomor urut di partai Perindo dapat dinegosiasi berdasarkan kemauan dari calon legislatif tersebut. Kemudian, didorong dengan kedekatan yang dimiliki oleh calon legislatif kepada ketua partai Perindo yang juga menjadi salah satu faktor nomor urut dalam partai Perindo dapat dinegosiasi. Meskipun disaat system proposional terbuka saat ini, mengenai nomor urut tidak berdampak besar terhadap kemenangan calon legislatif.

C. Tahap Pemilu

Tahap terakhir yaitu pemilihan umum. 50 orang yang didaftarkan oleh partai perindo kota Pekanbaru belum ada yang berhasil untuk memperoleh kursi. Menurut pak Budi salah satu calon legislatif dari partai Perindo faktor kegagalan partai Perindo Kota Pekanbaru memperoleh kursi sebagai berikut:

“kegagalan perolehan kursi dari perindo bisa disebabkan oleh salahnya keberpihakan atau pemilihan dalam menentukan pasangan presiden dan wakil presiden. Kemudian, juga di Perindo sistemnya sudah ada calon legislatif yang diunggulkan sehingga yang lain hanya sebagai pelengkap”

Pada pemilihan umum 2024 ini, partai Perindo memutuskan untuk mendukung pasangan presiden Ganjar Pranowo dan Mahmud MD. Sehingga, dengan pilihan tersebut menjadi bahan pertimbangan masyarakat yang tidak satu pilihan mengenai pasangan presiden tersebut. Maka, akan membuat masyarakat tidak mempertimbangkan calon legislatif dari partai Perindo. Kemudian, dengan adanya anggapan dari calon legislatif partai Perindo terhadap adanya calon legislatif yang diunggulkan sehingga berdampak terhadap munculnya sikap pesimis dari calon legislatif partai Perindo lainnya untuk bersaing dalam pemilihan legislatif 2024 ini. Tidak hanya itu saja terdapat faktor lain yang disebutkan oleh pak Budi sebagai berikut:

“daerah kita yang dominan masyarakat Muslim atau beragama Islam, kemudia ketua DPD partai Perindo yang beragama non muslim menjadi salah satu faktor image dari partai Perindo kena”

Kota Pekanbaru yang masyarakat atau penduduknya dominan beragama Islam, sehingga dalam pemilihan pemimpin tidak dapat dipungkiri masih juga memperhatikan agama dari calon legislatif tersebut dan orang – orang di lingkungan calon legislatif tersebut. Ketua partai Perindo yang beragama non muslim membuat image atau pandangan mengenai partai Perindo di masyarakat tidak terlalu dipertimbangkan. Semestinya, pada saat ini hal tersebut bukanlah faktor besar yang menyebabkan terjadi kegagalan.

3. Partai Nasdem

Partai Nasional Demokrat merupakan partai yang memiliki calon legislatif yang berlatar pengusaha dengan jumlah 20 orang. Dengan angka tersebut partai Nasdem menepati posisi ketiga terbanyak calon legislatif yang berlatar dari pengusaha

A. Tahap Sertifikasi

Tahap awal dalam proses rekrutmen calon legislatif. Tahap penentuan nama – nama yang akan didaftarkan ke komisi pemilihan umum. Pada tahap ini tidak jauh berbeda dengan tahap yang dilalui oleh partai lain dalam proses rekrutmen terhadap calon – calon legislatif. Berikut penjelasan pak Rifqy selaku ketua rekrutmen mengenai rekrutmen calon legislatif:

“rekrutmen terhadap calon legislatif di partai Nasdem menggunakan system terbuka. Terdapat istilah dalam proses rekrutmennya yaitu Nasdem Memanggil. Proses rekrutmen dilakukan pada tahun 2023.”

Nasdem Memanggil merupakan istilah lain dalam proses rekrutmen yang dilakukan oleh partai Nasdem untuk mencari orang – orang atau nama – nama yang akan menjadi calon legislatif dengan diusung oleh partai Nasdem. Sehingga, dapat diartikan bahwa proses rekrutmen yang dilakukan oleh partai Nasdem dilakukan secara terbuka. Siapa saja bisa mendaftarkan dirinya untuk menjadi calon legislatif yang diusung oleh partai Nasdem. Proses rekrutmen yang dilakukan oleh partai Nasdem di tahun 2023. Nama – nama yang sudah mendaftar akan dilakukan seleksi kembali oleh Partai Nasdem. Penjelasan lanjut mengenai rekrutmen yang dilakukan oleh partai Nasdem, yang dijelaskan oleh pak Rifqy sebagai berikut:

“pendaftar di sini dari berbagai kalangan seperti adanya kalangan mahasiswa, tokoh, pejabat pemerintah, pengusaha dan lainnya. Para calon legislatif tersebut lebih awal akan diminta untuk mengisi formulir, kemudian dilakukannya wawancara dan survey yang dilakukan oleh partai Nasdem”

Terdapat alur pengisian formulir oleh calon – calon legislatif yang ingin mendaftarkan diri untuk menjadi calon legislatif yang diusung oleh partai

Nasdem. Formulir tersebut telah disediakan oleh panitia rekrutmen partai Nasdem. Setelah proses pengisian formulir, terdapat alur selanjutnya yaitu melakukan wawancara oleh partai Nasdem kepada pihak calon – calon legislatif yang telah mendaftar. Alur yang dilakukan tidak hanya sampai disitu, terdapat alur survey yang dilakukan oleh partai Nasdem. Survey mengenai baliho atau spanduk yang dipasang oleh calon legislatif, kemudian survey ke lingkungan calon legislatif, seperti ke masyarakat yang berada di lingkungannya, dan keluarga pihak calon legislatif tersebut, dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar dukungan lingkungannya terhadap pencalonan yang dilakukan oleh calon legislatif tersebut. Dijelaskan kembali oleh pak Rifqy mengenai proses rekrutmen calon legislatif partai Nasdem sebagai berikut:

“setelah alur rekrutmen dilaksanakan, kemudian pihak DPD memberikan nama – nama rekomendasi yang akan dimajukan untuk menjadi calon legislatif yang usung oleh partai Nasdem. Seluruh keputusan mengenai rekrutmen berada di pihak DPP Partai Nasdem. Nama – nama yang akan menjadi calon legislatif yang diusung oleh partai Nasdem tersebut akan ditandatangani oleh ketua DPP Partai Nasdem.”

Setelah dilaksananya rangkaian proses rekrutmen yang telah ditentukan oleh DPD partai Nasdem, pihak DPD partai Nasdem mengumpulkan dan memberikan nama – nama calon legislatif tersebut kepada pihak DPP Partai Nasdem. Karena, DPP Partai Nasdem yang memberikan keputusan rekrutmen calon legislatif. Pihak DPD hanya memberikan rekomendasi nama, keputusannya ada di DPP Partai Nasdem.

B. Tahap Nominasi

Tahap setelah sertifikasi yaitu tahap nominasi. Tahap penentuan jumlah orang yang akan dicalonkan dan didaftarkan kepada pihak komisi pemilihan umum kota Pekanbaru. Berikut penjelasan dari pak Rifqy selaku ketua panitia rekrutmen:

“di partai Nasdem yang mendaftar dominan laki – laki. Terdapat 120 orang yang mendaftar dalam proses rekrutmen. yang dibutuhkan pihak Nasdem hanya 50 orang. 30% nya harus ada perempuan.”

Masih dominannya laki – laki yang mendaftar menjadi calon legislatif di Partai Nasdem Kota Pekanbaru. Jumlah yang mendaftar menjadi calon legislatif yang diusung oleh partai Nasdem yaitu 120 orang, sedangkan jumlah yang dibutuhkan oleh partai Nasdem untuk didaftarkan ke komisi pemilihan umum kota Pekanbaru yaitu 50 orang. Sehingga, terdapat 70 orang pendaftar yang tidak lolos menjadi calon legislatif yang diusung oleh partai Nasdem kota Pekanbaru. 70 orang tersebut tidak lolos atau tidak termasuk dalam poin – poin penilaian pihak partai Nasdem, berikut penjelasannya:

“terdapat empat point dalam penilaian calon legislatif yang mendaftar menjadi calon legislatif. Tetapi, point yang terpentingnya yaitu elektabilitas calon legislatif tersebut. Hal ini kami ketahui dari

survey yang dilakukan oleh tim kami. Selain itu adanya popularitas, akseptabilitas dan isitas”

Calon legislatif yang tidak lolos tersebut dikarenakan tidak lolos dalam point yang telah ditentukan oleh pihak Nasdem. Terdapat empat penilaian yaitu elektabilitas, akseptabilitas, popularitas dan isitas. Seluruh poin – poin tersebut dinilai saat proses rekrutmen dilaksanakan oleh panitia rekrutmen partai Nasdem Kota Pekanbaru. Sehingga, seluruh pendaftar calon – calon legislatif akan dinilai berdasarkan poin – poin yang akan ditentukan, dengan begitu 120 orang tersebut diperoleh 50 orang untuk didaftarkan Namanya di komisi pemilihan umum kota Pekanbaru.

C. Tahap Pemilihan Umum

Tahap terakhir dalam proses rekrutmen calon – calon legislatif. Tahap ini sudah menjadi penentuan hasil mengenai keberhasilan calon – calon legislatif tersebut untuk memperoleh kursi atau gagal dalam memperoleh kursi legislatif kota Pekanbaru. Sebelum mendaftarkan nama – nama calon legislatif yang diusung oleh partai Nasdem tersebut, terdapat proses penentuan nomor urut kepada calon – calon legislatif. Penentuan nomor urut di partai Nasdem sebagai berikut penjelasan dari pak Rifqy:

“dalam penentuan nomor urut di partai Nasdem ditentukan oleh pihak DPP, pihak DPD hanya mengusulkan kepada pihak DPP. Nomor urut 1 akan diberikan kepada calon – calon legislatif yang telah pencalonan dari periode sebelumnya. Kemudian, nomor urut 1 juga bisa diberikan kepada orang – orang yang berada distruktur partai Nasdem, seperti ketua, sekretaris dan lainnya. Tetapi, ada kesempatan juga untuk orang yang berasal dari partai lain tetapi memiliki kapasitas untuk memperoleh suara masyarakat, maka akan diajak untuk bergabung ke Nasdem dan akan diberikan nomor urut 1 oleh partai Nasdem. Pada saat system proporsional terbuka seperti saat ini nomor urut 1 bukanlah hal yang berdampak besar terhadap hasil yang diperoleh oleh calon legislatif.”

Penentuan nomor urut dalam pencalonan legislatif kota Pekanbaru, ditentukan oleh pihak DPP, pihak DPP di Partai Nasdem berperan besar dalam proses pencalonan legislatif yang diusung oleh partai Nasdem. DPD hanya berwenang dalam memberikan usulan kepada pihak DPP untuk penentuan nama – nama calon legislatif yang akan dicalonkan. Calon – calon legislatif yang telah ikut serta dalam pemilihan legislatif pada periode sebelumnya memiliki kesempatan untuk memperoleh nomor urut 1 ataupun berkesempatan untuk meminta nomor urut berdasarkan keinginan mereka, selain itu kader – kader yang berada di dalam struktur DPD partai Nasdem juga memiliki kesempatan untuk memperoleh nomor urut 1 dalam pencalonan legislatif. Kemudian, Nasdem juga memberikan keistimewaan terhadap kader dari partai lain yang memiliki kapasitas untuk memperoleh suara dari masyarakat untuk bergabung menjadi calon legislatif yang diusung oleh partai Nasdem dan dapat keistimewaan memperoleh nomor urut 1. Hanya saja untuk system proporsional terbuka saat ini, nomor urut 1 bukanlah hal penentu

kemenangan, nomor urut tidak terlalu berdampak besar terhadap hasil yang akan diperoleh. Kecuali dalam proses proporsional tertutup, nomor urut sangat berpengaruh untuk meraih kemenangan.

“daerah pilihan 2 merupakan salah satu daerah yang dinilai pesaingannya berat atau persaingan terkuat. Selain daerah pilihan 2, terdapat daerah pilihan 4 dan 6 yang diyakini merupakan persaingan yang berat dan kuat dalam pelaksanaan pemilihan legislatif 2024. Karena dinilai daerah yang terdiri dari berbagai suku seperti melayu, batak dan lainnya, serta daerah yang dinilai masih terdapat black campaign dan terdapat permusuhan antara calon legislatif satu sama lainnya.”

Masih maraknya terjadi black campaign pada saat proses kampanye berlangsung. Black campaign disini maksudnya sebagai kegiatan negatif dalam proses kampanye untuk menjatuhkan lawannya. Black campaign bisa terjadi di media sosial ataupun dilakukan secara langsung. Salah satu strategi yang negatif untuk memperoleh kemenangan dan menjatuhkan lawan. Strategi ini diyakini oleh pihak partai Nasdem masih terjadi pada daerah pilihan 2, daerah pilihan 4 dan daerah pilihan 6. Sehingga, daerah pilihan 2 merupakan daerah yang berat pesaingannya, tetapi partai Nasdem berhasil memperoleh kursi kemenangan di daerah pilihan tersebut. Tidak hanya itu, daerah – daerah pilihan tersebut memiliki beragam suku yang sulit untuk difokuskan calon legislaifnya, karena terdiri dari suku melayu, batak dan lainnya. Selanjutnya penjelasan mengenai latar belakang calon legislatif yang diusung leh partai Nasdem yang diungkapkan oleh pak Rifqy sebagai berikut:

“calon legislatif kota Pekanbaru 2024 yang diusung oleh partai Nasdem, rata – rata merupakan seorang pengusaha”

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dikatakan bahwa calon legislatif kota Pekanbaru yang diusung oleh partai Nasdem merupakan orang – orang yang berlatar pengusaha. 50 orang yang diusung oleh partai Nasdem merupakan pengusaha. Hasil dari proses pemilihan umum kota Pekanbaru tahun 2024, partai Nasdem berhasil memperoleh 5 kursi kemenangan.

4. Partai PKS

A. Tahap Sertifikasi

Tahap awal yang dilaksanakan oleh partai PKS untuk mencalonkan anggota legislatif yang diusungnya. Tidak terlalu jauh berbeda dari partai – partai lain yang telah dijelaskan di atas. Partai PKS juga melakukan open rekrutmen secara terbuka untuk siapa saja yang mau bergabung menjadi calon anggota legislatif yang diusung oleh partai PKS. Berikut penjelasan mengenai rekrutmen calon anggota legislatif di Partai PKS yang diungkapkan oleh Pak Sukis selaku Sekretaris DPD partai PKS:

“ rekrutmen dilakukan secara terbuka, rekrutmen calon legislatif yang diusung oleh partai PKS, terlebih dahulu dari kader yang ada di PKS, DPC Partai PKS, Dewan Pengurus Ranting (DPRA) yang

akan mendaftarkan dirinya ke DPD Partai PKS. Rekrutmen yang dilakukan dari tingkat daerah, Kecamatan, Kelurahan hingga Kota” Calon anggota legislatif yang diusung oleh partai PKS Kota Pekanbaru diperoleh dari rekrutmen yang dilakukan secara terbuka. Kemudian, calon – calonnya diperoleh juga dari kader – kader PKS yang telah ada atau telah bergabung di partai PKS dari sebelumnya, kader DPC Partai PKS, kemudian dari kader Dewan Pengurus Ranting (DPRA). Kader – kader tersebut akan mendaftarkan dirinya ke DPD Partai PKS untuk mencalonkan diri menjadi calon anggota legislatif yang diusung oleh partai PKS. Dapat dilihat perbedaan partai PKS dan Golkar, Golkar merekrut calon legislatif tanpa melalui tingkat kecamatan, tetapi di Partai PKS dalam proses rekrutmen calon anggota legislatifnya dari DPC Partai PKS, bahkan direkrut melalui Kader Dewan Pengurus Ranting Partai PKS (DPRA Partai PKS). Dari tingkat daerah, kemudian dilanjutkan ke tingkat kecamatan, kelurahan hingga ke tingkat Kota. Penjelasan tersebut diperkuat oleh penjelasan yang diungkapkan oleh tim BP3 partai PKS, sebagai berikut:

“kita di partai PKS ada struktur BP3. BP3 akan langsung turun ke bawah untuk mencari orang – orang yang memiliki kompetensi untuk menjadi calon anggota legislatif yang diusung oleh partai PKS. Di DPD Partai PKS kota Pekanbaru ini lebih dulu melakukan rekrutmen ke dalam bagian kami terlebih dahulu. Tidak hanya itu, kami juga menggunakan system eksisting. Sehingga, kami tidak memiliki panitia khusus untuk proses rekrutmen calon anggota legislatif”

DPD Partai PKS Kota Pekanbaru tidak memiliki panitia khusus untuk melaksanakan proses rekrutmen calon anggota legislatif. Di partai PKS Kota Pekanbaru terdapat Struktur BP3. BP3 merupakan struktur Badan Pemenangan Pemilu dan Pemilukada Partai PKS. BP3 ini memiliki kewenangan untuk turun langsung mencari orang – orang yang akan dicalonkan menjadi calon anggota legislatif. Mempersiapkan dalam pemilihan legislatif 2024 ini, partai PKS Kota Pekanbaru lebih dominan melakukan rekrutmen terlebih dahulu ke orang – orang yang sudah menjadi kader di partai PKS. Tidak hanya itu, partai PKS juga menggunakan system eksisting dalam proses rekrutmen calon – calon legislatif, system yang mengutamakan orang – orang yang sudah menjadi kader di PKS, atau orang – orang yang sudah menjadi calon – calon legislatif di periode pemilihan sebelumnya, bahkan orang – orang yang sudah terpilih menjadi anggota legislatif. Maka dari itu partai PKS tidak memiliki panitia khusus untuk proses rekrutmen calon anggota legislatif yang diusung oleh partai PKS. Mengenai pedoman atau aturan yang digunakan oleh pihak partai PKS dalam proses rekrutmen sebagai berikut penjelasan dari pak Sukis selaku Sekretaris DPD Partai PKS Kota Pekanbaru :

“untuk aturan yang kami gunakan sebagai pedoman yaitu aturan dari pihak komisi pemilihan umum.”

Sama seperti partai lainnya yang telah dijelaskan sebelumnya, untuk pedoman aturan yang digunakan oleh partai PKS yaitu aturan dari pihak Komisi Pemilihan Umum, yang berisi antara lain minimal umur, jumlah keikutsertaan perempuan dan aturan lainnya.

B. Tahap Nominasi

Proses rekrutmen yang dilakukan oleh partai PKS tidak hanya langsung menghasilkan 50 orang yang terpilih. Dalam proses rekrutmennya terdapat proses memilih kembali orang – orang yang telah mendaftarkan dirinya untuk menjadi calon legislatif yang diusung oleh partai PKS. Berikut hasil wawancara yang disampaikan anggota BP3:

“terdapat 200% yang mendaftar dari jumlah orang yang dibutuhkan 50 orang. Tetapi, 200% orang tersebut tidak dipublish nama – Namanya, hanya saja di data saja. Setelah itu, proses diskusi antar BP3 dan Kader Partai PKS untuk menentukan 120%. Tidak hanya sampai disitu, terjadi pemangkasan kembali menjadi 100% atau jumlah orang yang dibutuhkan oleh pihak partai untuk di daftarkan di komisi pemilihan umum.”

Jumlah pendaftar menjadi calon anggota legislatif yang diusung oleh partai PKS berkisar 200% pendaftar. Kemudian, 200% tersebut didiskualifikasi berdasarkan ketentuan – ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak partai PKS. 50 orang merupakan jumlah terakhir yang dibutuhkan oleh pihak partai PKS untuk mendaftarkan nama – nama tersebut di Komisi Pemilihan Umum.

C. Tahap Pemilu

Tahap terakhir yang dilakukan pihak partai dalam proses rekrutmen calon legislatifnya. Dalam proses rekrutmennya terdapat permasalahannya, salah satunya sebagai berikut:

“terdapat calon anggota legislatif yang akan dimajukan di salah satu dapil, tetapi terkendala dalam persyaratan yang dibutuhkan untuk mendaftar di Komisi Pemilihan Umum. Sehingga, membuat kami harus mengganti orang tersebut dalam waktu yang mendekati pemilu. Akibatnya proses kampanye dari calon tersebut tidak maksimal”

Proses rekrutmen yang dilakukan oleh pihak partai PKS terdapat kendala dalam pelaksanaannya. Terdapat calon legislatif yang tidak dapat memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak komisi pemilihan umum, sehingga membuat pihak PKS harus mengganti calon legislatif tersebut dalam waktu yang sudah tidak tergolong banyak untuk proses kampanye. Maka, calon legislatif tersebut tidak maksimal dalam proses kampanye dan tidak berhasil untuk memperoleh kemenangan dalam proses pemilihan. Proses penentuan nomor urut sebagai berikut dijelaskan oleh pihak BP3 PKS:

“nomor urut diputuskan oleh pihak DPP. Nomor urut ditentukan berdasarkan posisi struktur, jenjang kader muda dan kader pokok serta kontribusinya di partai. Tetapi saat ini nomor urut 1 tidak menentukan kemenangan dalam memperoleh suara, karena proses system proporsional terbuka.”

Pihak DPP partai PKS berperan besar dalam proses rekrutmen nama – nama calon anggota legislatif yang diusung oleh partai PKS. Hal ini dapat dilihat dari proses penentuan nomor urut yang diputuskan oleh pihak DPP, berdasarkan beberapa point seperti kontribusi terhadap partai, struktur partai serta jenjang kader muda dan kader pokok. Berdasarkan data hasil pleno, partai PKS merupakan partai yang memperoleh kursi kemenangan calon legislatif kota Pekanbaru yang berjumlah banyak, yaitu 8 orang. Di setiap daerah pilihan terdapat calon legislatif yang berhasil memperoleh kemenangan diusung oleh partai PKS.

Faktor Internal dan Faktor Eksternal Rekrutmen Partai Politik Golkar, Perindo, Nasdem dan PKS terhadap Pengusaha yang Menjadi Calon Legislatif Kota Pekanbaru

Berdasarkan analisis penulis terhadap proses pelaksanaan rekrutmen calon legislatif yang dilakukan oleh partai politik kota Pekanbaru terkhusus Partai Golkar, Perindo, Nasdem dan PKS terhadap pengusaha, terdapat beberapa faktor internal dan faktor eksternal pengusaha direkrut oleh partai politik, sebagai berikut:

a. Faktor Internal

- Karakteristik yang melekat

Karakteristik yang melekat di diri calon legislatif seperti fisik yang dimiliki, etnis yang dimiliki oleh calon legislatif berlatar pengusaha menjadi salah satu faktor internal calon legislatif. Performance seseorang pendaftar sangat diperhatikan oleh pihak penyeleksi di keempat partai tersebut. Selain itu juga terdapat poin sehat jasmani atau dikenal dengan istilah tageh. Dengan begitu dapat diartikan bahwa pengusaha – pengusaha yang menjadi calon legislatif yang diusung oleh keempat partai tersebut dapat memenuhi poin yang telah ditentukan tersebut. Performance yang dihasilkan oleh sosok pengusaha bukan lagi hal yang diragukan, karena kegiatan sehari – harinya sosok pengusaha tersebut memiliki kegiatan untuk bertemu dengan orang banyak ataupun lingkungannya. Sehat jasmani yang dimiliki pengusaha juga bukanlah hal yang diragukan lagi. Sosok pengusaha pastinya akan memperhatikan kesehatan jasmani yang dimiliki oleh dirinya. Sehingga, dua hal tersebut menjadi faktor pendukung terpilihnya pengusaha untuk menjadi calon legislatif yang diusung oleh partai Golkar, Perindo, Nasdem dan PKS kota Pekanbaru.

- Agama Norma dan Nilai

Setiap partai pasti memiliki ideologi sendiri dalam menjalankan tugas partainya. Golkar, Perindo dan Nasdem yang merupakan partai yang bisa siapa saja ingin bergabung, sehingga ketiga partai tersebut bukanlah partai yang terlalu memperhatikan agama seseorang untuk menjadi calon legislatif yang diusung. Berbeda dengan PKS yang basic partainya merupakan partai Islam.

Ketokohan yang dimiliki oleh sosok pengusaha menjadi daya Tarik pihak keempat partai tersebut untuk menjadikan calon legislatifnya. Maka, tidak heran jika calon legislatif yang diusung oleh partai

Golkar, Perindo, Nasdem dan PKS merupakan sosok pengusaha. Ketokohan sudah terdapat dalam diri pengusaha yang membuat terkumpulnya massa pendukung terhadap pengusaha tersebut.

- **Sumber Daya Finansial**

Ekonomi yang dimiliki oleh sosok pengusaha bukan lagi hal yang diragukan. Dengan kemampuan ekonomi yang dimiliki oleh pengusaha, maka diyakini bahwa hanya sosok pengusaha yang bisa saling melakukan perlawanan terhadap pemberian dari calon lainnya. Sehingga, pengusaha dengan modal ekonomi yang dimiliki menjadi salah satu faktor pendukung partai untuk merekrut pengusaha menjadi calon legislatif.

Tahun 2024 di Indonesia sendiri merupakan tahun pesta politik, hal serupa di Kota Pekanbaru. Permintaan – permintaan yang diberikan oleh masyarakat dapat dipenuhi oleh sosok pengusaha yang memiliki modal besar. Dengan mengeluarkan modal besar pastinya terdapat tujuan tertentu seperti memperoleh dukungan dari masyarakat untuk memperoleh kursi kemenangan di legislatif kota Pekanbaru.

Tidak sedikit calon legislatif yang mengatakan bahwa 2024 merupakan tahun biaya politik yang tinggi. Pentingnya finansial dalam proses pemilihan legislatif menjadi rahasia umum yang bahkan masyarakat juga mengetahuinya.

- **Motivasi Calon Legislatif**

Kehadirannya calon legislatif yang berlatar pengusaha dalam politik pastinya memiliki berbagai alasan. Tidak dapat dipungkiri terdapat alasan untuk menambah relasi dalam dunia bisnis, meningkatkan bisnis, menambah bisnis baru berdasarkan hobi selain ingin memperjuangkan aspirasi – aspirasi dari masyarakat dan lainnya.

b. Faktor Eksternal

- **Dukungan Massa**

DPD partai Golkar khususnya tim penyeleksi melakukan survey ke masyarakat untuk mengetahui tentang calon legislatif yang mendaftar. Melihat dari sisi lingkungan calon mendukung atau tidak, dan mengetahui popularitas dan dukungan massa yang dimiliki oleh calon legislatif tersebut. Popularitas yang dimiliki calon legislatif berlatar belakang pengusaha sebagai salah satu point penilaian. Pengusaha yang pada umumnya dikenal dengan memiliki banyak pendukung massa atau pengusaha banyak dikenal oleh orang lain. Sehingga, untuk popularitas yang dimiliki seorang pengusaha menjadi faktor pendukung pihak keempat partai tersebut untuk merekrut pengusaha menjadi calon legislatif, dari segi pegawai yang dimiliki, rekan bisnis serta koneksi yang dimiliki dan lainnya.

- **Perubahan Kondisi Politik**

para pengusaha yang banyak terlibat dalam politik, karena mereka merupakan kelompok yang memiliki modal keuangan yang cukup untuk bersaing dengan satu dan lainnya.

Pengusaha yang menjadi calon legislatif belum tentu memiliki pengalaman politik yang memadai. Bahkan terdapat pengusaha yang baru saja bergabung dalam politik, sehingga belum banyak mengetahui tentang politik. Visi misi serta program yang dimiliki saat kampanye bukan menjadi bahan pertimbangan utama oleh masyarakat, melainkan besarnya nominal yang diberikan oleh setiap calon legislatif. Maka, sosok pengusaha yang kemampuan politiknya kurang maksimal bukan menjadi hambatan untuk mencalonkan diri sebagai calon legislatif yang diusung oleh partai. Dan tidak terdapatnya syarat minimal tahun gabung atau menjadi kader di partai untuk mencalonkan diri dalam pemilihan legislatif.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian penulis di atas, maka kesimpulan yang diperoleh yaitu:

- a. Pelaksanaan rekrutmen partai politik Golkar, Perindo, Nasdem dan PKS terhadap pengusaha yang menjadi calon legislatif di pemilihan legislatif 2024 kota Pekanbaru dapat dilihat dari beberapa poin sebagai berikut: pertama, Tahap Sertifikasi partai Golkar, Perindo, Nasdem dan PKS sama – sama melakukan rekrutmen secara terbuka, perbedaan terletak pada partai Golkar yang melakukan perubahan dengan pemangkasan pencalon yang tidak melalui tingkat kecamatan lagi, kemudian partai PKS yang tidak memiliki tim penyeleksi rekrutmen, sehingga calon legislatif diperoleh berdasarkan rekomendasi struktur BP3 PKS. Kedua, tahap nominasi yang dilakukan oleh partai Golkar, Perindo, Nasdem dan PKS terhadap nama – nama yang mendaftar di masing – masing partai. Angka pendaftar mencapai 100% lebih bahkan ada yang 200 % pendaftar dari jumlah yang dibutuhkan untuk didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru. Jumlah tersebut gugur saat proses wawancara dengan syarat – syarat yang telah ditetapkan sebelumnya oleh masing – masing partai. Syarat dominan pada empat partai tersebut mengenai isitas atau kemampuan finansial yang dimiliki oleh calon legislatif. Ketiga, tahap Pemilihan Umum yang diikuti oleh partai Golkar, Perindo, Nasdem dan PKS, dalam penentuan nomor urut untuk ke empat partai tersebut bisa diminta sesuai dengan keinginan pendaftar, sedangkan untuk partai Golkar, Perindo, Nasdem dan PKS lebih mengutamakan kader – kader yang memiliki track record baik di partai. Untuk hasil keempat partai tersebut dalam pemilihan legislatif kota Pekanbaru 2024 yaitu partai Golkar memperoleh 5 kursi kemenangan, partai Perindo belum berhasil memperoleh kursi kemenangan, untuk partai Nasdem berhasil memperoleh 5 kursi kemenangan dan partai PKS berhasil memperoleh 8 kursi kemenangan.
- b. Faktor – faktor internal dan eksternal pengusaha menjadi calon legislatif yang diusung oleh partai Golkar, Perindo, Nasdem dan PKS yaitu faktor internal karakteristik yang melekat pada diri calon legislatif, agama norma dan nilai diri pengusaha, sumber daya finansial yang dimiliki oleh calon legislatif berlatar

pengusaha dan motivasi yang dimiliki oleh sosok pengusaha, sumber daya finansial yang dimiliki calon legislatif menjadi salah satu point penting oleh ke empat partai tersebut dalam merekrut calon legislatif, diyakini bahwa pemilihan umum 2024 merupakan pemilihan umum yang memiliki biaya politik yang sangat tinggi, hal ini dapat dilihat bahwa terdapat biaya politik yang dikeluarkan oleh calon legislatif berlatar pengusaha yang diusung oleh partai Golkar, Perindo, Nasdem dan PKS Kota Pekanbaru yang terpilih ataupun tidak terpilih mengeluarkan biaya paling rendah 700 Juta hingga kurang lebih 2 Miliar. tetapi hal tersebut memberikan dampak positif dan negatif, sisi positifnya memberikan bantuan dana partai, bertambahnya basis suara partai, sedangkan sisi negatif calon legislatif akan menghalalkan segala cara untuk memperoleh kemenangan sehingga kualitas demokrasi di Kota Pekanbaru semakin memburuk. Sedangkan faktor eksternalnya yaitu dukungan massa yang dimiliki calon legislatif berlatar pengusaha dan kondisi perubahan politik. Hadirnya pengusaha dalam calon legislatif diyakini oleh ke empat partai tersebut sudah memiliki massa tersendiri dengan relasi yang dimiliki. Sedangkan kondisi perubahan politik mengenai Tahun 2024 masyarakat Kota Pekanbaru yang lebih mengutamakan jumlah nominal yang diberikan dibandingkan visi, misi serta program yang dimiliki oleh calon legislatif yang berlatar pengusaha, tidak hanya itu bahkan partai Golkar, Perindo, Nasdem dan PKS Kota Pekanbaru tidak mengutamakan calon legislatif yang memiliki kemampuan politik ataupun pengalaman politik

DAFTAR PUSTAKA

- Andriaananta, R. S. (2018). Pengusaha dan Politik: Tabu, Realistis, atau Keharusan. *Geotimes.Id*. <https://geotimes.id/opini/pengusaha-dan-politik-tabu-realistis-atau-keharusan/>
- Anti Corruption Learning Center. (2023). Biaya dan Mahar Politik Pemicu Korupsi. *Aclc.Kpk.Co.Id*. <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230904-biaya-dan-mahar-politik-memicu-korupsi>
- Azhar, M. A. (2013). Relasi Pengusaha-Penguasa dalam Demokrasi: Fenomena Rent Seeker Pengusaha jadi Penguasa. *Udayananetworking*, 2(1).
- Desmawanto, R. (2023a). Ayo Mendaftar! DPD Perindo Kota Pekanbaru Buka Pendaftaran Bacaleg Ditutup 16 Maret Mendatang. *Sabangmeraukenews.Com*. <https://www.sabangmeraukenews.com/berita/9053/ayo-mendaftar-dpd-perindo-kota-pekanbaru-buka-pendaftaran-bacaleg-ditutup-16-maret-mendatang.html>
- Desmawanto, R. (2023b). Partai Perindo Kota Pekanbaru Bergejolak, Tim Penjaringan Bakal Caleg Tuntut Ganti Rugi dan Ancam Gugat Partai. *Sabangmeraukenews.Com*. <https://www.sabangmeraukenews.com/berita/9699/partai-perindo-kota-pekanbaru-bergejolak-tim-penjaringan-bakal-caleg-tuntut-ganti-rugi-dan-ancam-gugat-partai>
- Detiknews.com. (2021). Jejak Kasus Edhy Prabowo hingga Divonis 5 Tahun Penjara. *Detiknews.Com*. <https://news.detik.com/berita/d-5645204/jejak-kasus-edhy-prabowo-hingga-divonis-5-tahun-penjara>

- Dihni, V. A. (2023). Cek Data: Politisi Berlatar Pengusaha Takkan Korupsi? *Katadata.Co.Id*. <https://katadata.co.id/cek-data/63f754767a4a9/cek-data-politisi-berlatar-belakang-pengusaha-takkan-korupsi>
- Djani, L. (2005). Dwifungsi Penguasa - Pengusaha. *Icw.or.Id*. <https://antikorupsi.org/id/article/dwifungsi-penguasa-pengusaha>
- Fauziah, I. N. (2017). *Pengusaha dalam Pemilu Legislatif 2014 Studi Tentang : Kandidasi Para Pengusaha di PDIP Kota Surabaya*. Universitas Airlangga.
- Fauzi, A., Nisa, B., Napitupulu, D., Abdillah, F., Gde Satia Utama, A. A., Zonyfar, C., Nuraini, R., Silvi Purnia, D., Setyawati, I., Evi, T., Dian Handy Permana, S., & Susila Sumartiningsih, M. (2022). *Metodelogi Penelitian*. Pena Persada.
- Fiantika, F. R., Wasil, M., Jumiayati, S., Honesti, L., Wahyuni, S., Mouw, E., Jonata, Mashudi, I., Hasanah, N., Maharani, A., Ambarwati, K., Noflidaputri, R., Nuryami, & Waris, L. (2022). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Fitriyah, F. (2020). Partai Politik, Rekrutmen Politik dan Pembentukan Dinasti Politik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 11(1), 1–17. <https://doi.org/10.14710/politika.11.1.2020.1-17>
- Hariyanto, I. (2020). Suap Import Bawang Putih, EKS Anggota DPR Nyoman dituntut 10 Tahun penjara. *Detiknews.Com*. <https://news.detik.com/berita/d-4987520/suap-impor-bawang-putih-eks-anggota-dpr-nyoman-dituntut-10-tahun-penjara>
- Hasan, M., Tuti Khairani Harahap, Mp., Syahrial Hasibuan, Ms., Iesyah Rodliyah, M., Sitti Zuhairah Thalbah, Mp., Cecep Ucu Rakhman, Mp., Paskalina Widiastuti Ratnaningsih, M., Inanna, Mh., Andi Aris Mattunruang, Mp. S., Nursaeni, Mp., Yusriani, Mp., Nahriana, Mk., Dumaris Silalahi, Mp. E., Dra Sitti Hajerah Hasyim, Mp., Azwar Rahmat, Ms., Yetty Faridatul Ulfah, Mtp., & Nur Arisah, Mh. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Tahta Media Group.
- Indonesia Corruption Watch. (2005). Mengendus Aroma KKN Politisi - Pengusaha. *Ice.or.Id*. <https://antikorupsi.org/id/article/mengendus-aroma-kkn-politisi-pengusaha>
- Iqbal, M. (2019). Makin Banyak Pengusaha Rangkap jadi Politisi, Berbahayakah? *Cnbc.Indonesia.Com*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20191007140241-4-104956/makin-banyak-pengusaha-rangkap-jadi-politisi-berbahayakah>
- Katz, R. S., & Crotty, W. (2006). *Handbook Partai Politik*. Nusa Media .
- Kesbangpol Kulon Progo. (2022). Biaya Politik di Indonesia mahal . *Kesbangpol.Kulonprogokab.Go.Id*. <https://kesbangpol.kulonprogokab.go.id/detil/657/biaya-politik-di-indonesia-mahal>
- kpu.go.id. (2015). *Sejarah Pemilihan Umum Republik Indonesia*. https://www.kpu.go.id/koleksigambar/1_OK_-_SEJARAH_PEMILU_1-5.pdf
- Kristiadi, J. (2006). Fenomena Dwifungsi Pengusaha-Penguasa. *Icw.or.Id*. <https://antikorupsi.org/id/article/fenomena-dwifungsi-pengusaha-penguasa>

- Kumalasanti, S. R. (2023). Biaya Politik Tinggi Sumbang Kemunduran Demokrasi . *Kompas.Id.*
<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/12/17/biaya-politik-tinggi-sumbang-kemunduran-demokrasi>
- Maza, B. F. (2023). *Peningkatan Kualitas Berpolitik Pengusaha Nasional Guna Memantapkan Demokrasi dalam Rangka Menghadapi Pemilu Serentak di Indonesia.*
- Murti, A. S. (2022). DPR Ideal dan Dominasi Caleg Jalur Pengusaha. *News.Detik.Com.* <https://news.detik.com/kolom/d-6228466/dpr-ideal-dan-dominasi-caleg-jalur-pengusaha>
- Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif.* Harfa Creative.
- Novelino, A. (2020). Lika - Liku Kasus Korupsi Eks Bendum Demokrat Nazaruddin. *Cnnindonesia.Com.*
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200813160119-12-535394/likaliku-kasus-korupsi-eks-bendum-demokrat-nazaruddin>
- Pamungkas, Sigit. (2009). *Perihal pemilu.* Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada.
- Pekanbaru.go.id. (2020). Mengenal Kota Pekanbaru . *Pekanbaru.Go.Id.*
<https://www.pekanbaru.go.id/p/menu/profil-kota/mengenal-kota-pekanbaru>
- Prayitno, R. B., & Prayugo, A. (2023). *Teori Demokrasi : Memahami Teori dan Praktik.* CV Budi Utama.
- Putra, D. R. (2024). Mengakhiri Politik Biaya Tinggi . *Kumparan.Com* .
<https://kumparan.com/dede-rohana-putra/mengakhiri-politik-biaya-tinggi-237WzrHMCow>
- Putra, S. Y. (2023). Benarkah Perindo Guyur Caleg Potensial Hingga Miliaran Rupiah? Ini: Saya Hanya Diberi Pancing. *Cakaplah.Com.*
<https://www.cakaplah.com/berita/baca/95977/2023/03/01/benarkah-perindo-guyur-caleg-potensial-hingga-miliaran-rupiah-iin-saya-hanya-diberi-pancing#sthash.PVsUpQJM.dpbs>
- Putri, A. A. (2023). Praktik Korupsi Tidak Mengenal Latar Belakang Pekerjaannya. *Goodstats.Id.* <https://goodstats.id/article/praktik-korupsi-tidak-mengenal-latar-belakang-pekerjaannya-nngE8>
- Rachman, A., & Wibowo, E. A. (2022). IM57+ Ungkap Bahaya Penguasa Merangkap Pengusaha. *Nasional.Tempo.Co.*
<https://nasional.tempo.co/read/1575096/im57-ungkap-bahaya-penguasa-merangkap-pengusaha>
- Republica.co.id. (2015). Saat Pengusaha Berpolitik. *Republica.Co.Id.*
<https://republika.co.id/berita/nmw94f23/saat-pengusaha-berpolitik>
- Retaduari, E. A. (2022). Awal Mula Kasus Korupsi E-KTP yang sempat Hebohkan DPR hingga seret Setya Novanto. *Kompas.Com.*
<https://nasional.kompas.com/read/2022/02/04/12351421/awal-mula-kasus-korupsi-e-ktp-yang-sempt-hebohkan-dpr-hingga-seret-setya?page=all>
- Riau Jurnal. (2024). DPD Golkar Pekanbaru Mulai Buka Penjaringan Bacaleg 2024, Kaum Milenial Bisa Mendaftar . *Riaujurnal.Com.*
<https://www.riaujurnal.com/detail/berita/dpd-golkar-pekanbaru-mulai-buka-penjaringan-bacaleg-2024--kaum-milenial-bisa-mendaftar>

- Rohaniah, Y., & Efriza. (2015). *Pengantar Ilmu Politik Kajian Mendasar Ilmu Politik*. Intrans Publishing.
- Rush, M., & Althoff, P. (1997). *Pengantar Sosiologi Politik*. Raja Grafindo Persada.
- Sigit, P. (2011). *Partai Politik : Teori dan Praktik di Indonesia*. Institute for Democracy and Welfarism.
- Sulaiman, E. (2021). DPD Golkar Pekanbaru Buka Penjaringan Bacaleg 2024. *RiauPos.Co*. <https://riaupos.jawapos.com/pekanbaru/2253545207/dpd-golkar-pekanbaru-buka-penjaringan-bacaleg-2024?page=2>
- Suprihartini, A. (2018). *Partai Politik di Indonesia*. Cempaka Putih.
- Surbakti, R. (2010). *Memahami Ilmu Politik*. Grasindo.
- Suryo, O. H. (2014). Konspirasi Bisnis (Pengusaha) dalam Politik Praktis. *Transformasi*, 1(26), 1–51.
- Taufikurrahman. (2019). Fungsi partai politik pada kekuasaan eksekutif dan legislatif berdasar pada sistem pemerintahan di Indonesia. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 16(2), 145–153. <https://journal.uny.ac.id/index.php/civics/index>
- Tongari, I., Iman Subono, N., & Hadibroto Supit, A. (2021). Malpraktik Calon Legislatif Pengusaha dalam Pemilihan Legislatif DPR-RI Tahun 2019. *Jurnal Sosial Dan Politik*, 11(1).
- Wibowo, C. (2018). *Potret Rekrutmen Politik di Indonesia*. Indocamp.
- Yani, A. A. (2005). Penguasaha Trend atau Tuntutan Demokrasi. *Cpcd.Unhas.Ac.Id*. <https://cpcd.unhas.ac.id/penguasaha-trend-atau-tuntutan-demokrasi/>